



**LAPORAN AKHIR  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN  
KEBIJAKAN“LAHAN ABADI” PERTANIAN  
(Studi Kasus: Kecamatan Pangalengan)**

Oleh:

Yeni Astuti A	H14090024 /2009
Rismayani Nursyah	H14090027 /2009
Ika Syahfitri	H14090064 /2009
Indri Mutia M	H14090120 /2009
Myrella Velika A	H54100014 /2010

Dibiayai oleh:

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa  
Nomor : 050/SP2H/KPM/Dit.Litabmas/V/2013, tanggal 13 Mei 2013

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2013**

### LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Analisis faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan "lahan abadi" pertanian (studi kasus: Kecamatan Pangalengan)
2. Bidang Kegiatan :  PKM-P      ( ) PKM-K      ( ) PKM-KC  
( ) PKM-T      ( ) PKM-M
3. Bidang Ilmu : ( ) Kesehatan      ( ) Pertanian  
( ) MIPA      ( ) Teknologi dan Rekayasa  
 Sosial Ekonomi      ( ) Humaniora  
( ) Pendidikan
4. Ketua Pelaksana Kegiatan
  - a. Nama Lengkap : Yeni Astuti Anggraini
  - b. NIM : H14090024
  - c. Jurusan : Ilmu Ekonomi
  - d. Universitas/Institut/Politeknik : Institut Pertanian Bogor
  - e. Alamat Rumah dan No.Tel/HP : Jalan Reformasi Utama RT 01 RW 01  
No.1 Pondok Aren Tangerang Selatan  
Telp 085697704185
  - f. Alamat Email : yeni\_astuti90@yahoo.com
5. Anggota Pelaksana Kegiatan : 4 orang
6. Dosen Pendamping
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Muhammad Findi Alexandi, M.E
  - b. NIDN : 19730124 200710 1 001
  - c. Alamat Rumah dan No.Tel/HP : Taman Cimanggu Jl. Boulevard No.12  
Bogor 16163  
Telp 0251-8336864 HP 08129965280
  - d. Biaya Kegiatan Total
  - e. Dikti : Rp 6.800.000,00.
  - f. Sumber Lain :-
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) bulan

Bogor, 26 Juni 2013

Menyetujui,  
Ketua Jurusan/Program Studi

Ketua Pelaksana Kegiatan



(Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim)  
NIDN. 19641022 198903 1 003



(Yeni Astuti Anggraini)  
NIM. H14090024



Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

(Dr. H. Yonny Koesmaryono, MS)  
NIDN. 19581228198503 1 003

Dosen Pendamping

(Dr. Muhammad Findi A, M.E)  
NIDN. 19730124 200710 1 001

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN KEBIJAKAN  
“LAHAN ABADI” PERTANIAN  
(Studi Kasus: Kecamatan Pangalengan)**

**Yeni Astuti Anggraini <sup>1)</sup>, Rismayani Nursyah <sup>2)</sup>, Ika Syahfitri <sup>3)</sup>, Indri Mutia Maulani <sup>4)</sup>,  
Myrella Vellika Amanta <sup>5)</sup>**

<sup>1</sup> Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
email: yeni\_astuti90@yahoo.com

<sup>2</sup> Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
email: rismayaninursyah@yahoo.com

<sup>3</sup> Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
email: ika\_syahfitri31@gmail.co.id

<sup>4</sup> Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
email: toattoet@yahoo.com

<sup>5</sup> Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
email: amanta.vellika@yahoo.com

***Abstract***

*The scarcity of land and water resourch, the dynamics of development, as well as rapid the increase in population led to the conversion of agricultural land into non-agricultural. The impact of conversion is felt by the whole society. This study aims to identify factors inhibiting agricultural policies “Lahan Abadi” using descriptive analysis with data collection and interview in Pangalengan.*

*Keyword: agricultural land, UUD 41 2009, descriptive analysis.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2013 ini ialah Penerapan Lahan Abadi, dengan judul Analisis faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan “lahan abadi” pertanian (studi kasus: Kecamatan Pangalengan).

Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan dana sehingga Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Penelitian ini dapat terlaksana. Terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Findi Alexandi, M.E selaku pendamping PKM-Penelitian yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kecamatan Pangalengan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan inilah yang sering kali tidak diperhitungkan, seperti meningkatnya lahan kritis, meningkatnya erosi tanah dan sedimentasi, serta terjadinya banjir dimusim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan “lahan abadi” pertanian di Kecamatan Pangalengan?

### **3. Tujuan Program**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini terkait dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan “lahan abadi ” pertanian khususnya di Kecamatan Pangalengan.

### **4. Luaran yang Diharapkan**

Target luaran yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Pangalengan mengenai sistem pengelolaan lahan abadi yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi mengatasi berbagai persoalan ketersediaan lahan abadi pertanian yang terjadi. Dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menuangkan ide-ide kreatif dalam pengaplikasian teori-teori ekonomi yang dipelajari dan menumbuhkan rasa kerjasama yang dapat dirasakan oleh diri sendiri maupun kelompok. Selain itu, penduduk Jawa Barat khususnya akan mendapat banyak keuntungan dari penyediaan lahan abadi yang optimal ini. Salah satu keuntungan yang didapat yaitu meningkatnya produktivitas komoditas pertanian di Jawa Barat.

### **5. Kegunaan Program**

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Bandung sebagai bahan rujukan untuk suksesnya kebijakan lahan abadi bagi pertanian di provinsi Jawa Barat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Lahan abadi pertanian adalah suatu kebijakan tentang tata penggunaan tanah, dimana pemerintah mengalokasikan 15 juta ha lahan sawah ditambah 15 juta ha lahan tegalan, yang hanya boleh digunakan untuk kegiatan pertanian, dan tidak diizinkan dikonversi ke bentuk-bentuk penggunaan lain. Pembaruan agrarian, atau adakalanya disebut dengan “Reforma Agraria”, dari asal kata *Agrarian Reform*, terdiri dari dua pokok permasalahan yaitu “penguasaan dan pemilikan” di satu sisi, dan “penggunaan dan pemanfaatan” di sisi lainnya. Kedua sisi tersebut ibarat dua sisi mata uang yang harus dilakukan secara seiring. Namun sayangnya, sebagian besar pihak terutama kalangan LSM, lebih banyak yang tertarik kepada satu sisi

saja yaitu tentang “penguasaan dan pemilikan”, atau disebut dengan aspek *landreform*.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. (UU No. 41 tahun 1999)

### III. METODE PENDEKATAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif melalui studi kasus yaitu Kecamatan Pangalengan

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur.
- Bahan primer diperoleh dari hasil wawancara tanggal 4,5 dan 6 April 2013 dengan 30 orang pemilik lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pertanian kabupaten Bandung dan menganalisis UU Nomor 41 tahun 2009
- Bahan sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian.

### IV. PELAKSANAAN PROGRAM

#### 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Wawancara dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Margamukti, Desa Margamekar, Desa Sukamanah pada tanggal 4,5,6 April 2013. Selain itu dilaksanakan pula wawancara dengan Dinas terkait seperti BPN, Dinas Pertanian, dan Bappeda Kabupaten Bandung pada tanggal 4 April 2013. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan dari Maret 2013 sampai April 2013.

#### 2. Tahapan Pelaksanaan/Jadwal Faktual Pelaksanaan

Tabel 1 Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Waktu
Tahap Persiapan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan proposal</li> <li>• Rancangan anggaran kegiatan</li> <li>• Penyusunan kuisisioner</li> </ul>	24 September – 8 Oktober 2012 7 Oktober 2012 27 Maret 2013
Tahap Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara (turun lapang)</li> <li>• Kebutuhan data sekunder</li> </ul>	4-6 April 2013 4 April 2013
Tahap Analisis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input data</li> <li>• Pengolahan data</li> <li>• Hasil</li> </ul>	13 April 2013 14 April 2013 Minggu ke-3 April
<b>Total Masa Pelaksanaan Penelitian</b>	<b>2 Bulan</b>

#### 3. Instrumen Pelaksanaan

Instrumen yang digunakan untuk pengolahan data adalah *Microsoft Excel*.

#### 4. Rekapitulasi Rancangan dan Realisasi Biaya

Tabel 2 Rincian Biaya

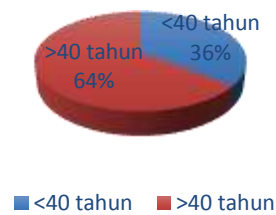
No	Keterangan Kegiatan		Biaya
1.	Pengumpulan data dan turun lapang		
	• Transportasi Bogor –Bandung PP	Rp	320.000
	• Transportasi Dramaga-Baranangsiang PP	Rp	50.000
	• Sewa mobil, supir, dan bbm	Rp	1.500.000
	• Penginapan	Rp	1.500.000
	• Makan (5 orang x 20000 x 12)	Rp	1.200.000
2.	Pembelian souvenir		
	• Souvenir untuk responden	Rp	680.000
	• Souvenir untuk lembaga terkait	Rp	338.000
3.	Perbanyak kuesioner + print	Rp	59.000
4.	Modem	Rp	500.000
5.	Plastik parsel	Rp	5.000
6.	Double tape	Rp	1.500
7.	Pita 5 meter	Rp	2.500
8.	Kertas HVS 70 gram	Rp	50.000
9.	Tinta printer	Rp	250.000
10.	Pulsa modem	Rp	100.000
11.	Pulpen 1 pack	Rp	20.000
12.	Gunting	Rp	7.000
13.	Straples dan refill straples	Rp	25.000
14.	Amplop 1 pack	Rp	10.000
15.	Papan jalan 5 buah	Rp	75.000
16.	CDRW + Burn	Rp	7.000
17.	Pulsa telepon	Rp	100.000
	Total	Rp	6.800.000

#### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Hasil Wawancara dengan Pemilik Lahan

###### a. Usia

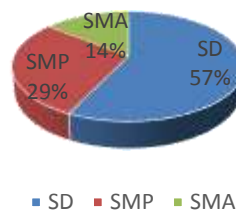
Responden terdiri dari para pemilik lahan baik yang telah melakukan konversi maupun yang tidak, berusia antara kurang dari 40 tahun hingga lebih dari 40 tahun. Dari hasil pengamatan terhadap 30 pemilik lahan di Kecamatan Pangalengan, sebesar 64% dari para pemilik lahan berusia diatas 40 tahun dan sisanya berusia kurang dari 40 tahun. Sebaran kelompok usia pemilik lahan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Persentase kelompok usia responden

#### b. Tingkat Pendidikan

Secara teoritis, tingkat pendidikan masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan yang merupakan faktor lingkungan sosial ekonomi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan lahan abadi di suatu wilayah. Hasil pengamatan di lapangan ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.

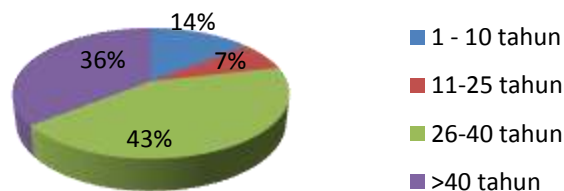


Gambar 2. Tingkat pendidikan responden

Hasil analisis data primer menunjukkan bahwa 57% responden berpendidikan SD sedangkan sisanya yaitu 29 % berpendidikan SMP dan 14% berpendidikan SMA. Tingkat pendidikan masyarakat berkaitan dalam hal pengambilan keputusan dalam bidang pertanian, yaitu dalam penentuan komoditas, dalam usaha budidaya sampai pada proses pemasaran hasil pertanian.

#### c. Lama Menetap

Lama menetap responden ini ditetapkan untuk mengetahui seberapa lama responden tinggal di daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil wawancara dengan responden, sebesar 43% telah lama menetap lebih dari 40 tahun, 36% telah menetap selama 26-40 tahun, 14% menetap 11-25 tahun, dan 7% menetap kurang dari 10 tahun. Bahkan sebagian besar dari responden telah menetap sejak lahir. Sebaran lama menetap dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



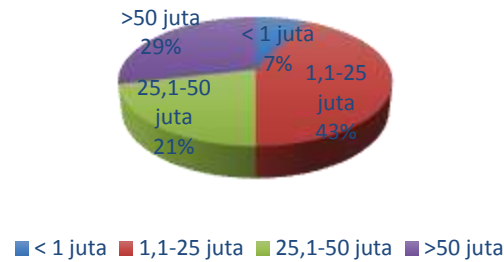
Gambar 3. Persentase lama menetap responden

#### d. Jumlah Penghasilan Perbulan

Kisaran pendapatan yang didapat oleh para pemilik lahan dari hasil pertanian berkisar antara Rp 500.000 - Rp 133.333.333 per bulannya jika dihitung dari pendapatan sekali panen dalam satu musim per hektar. Sebesar 43% dari pemilik lahan pertanian memiliki penghasilan 1,1-25 juta perbulan, 29% memiliki



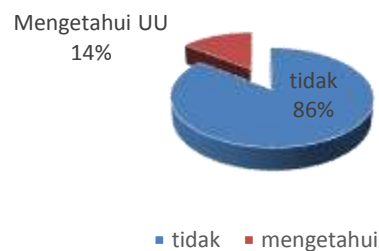
penghasilan diatas 50 juta perbulan, 21% memiliki penghasilan 25,1-50 juta perbulan, dan 7% memiliki penghasilan kurang dari 1 juta perbulan. Sebaran jumlah penghasilan responden dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. persentase penghasilan per bulan

#### e. Pemahaman Terhadap UU

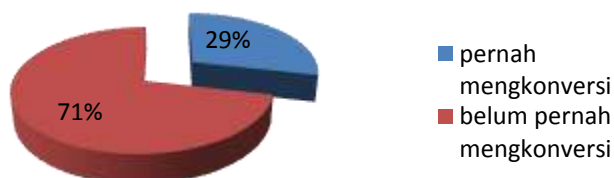
Sebelum pemerintah menerapkan suatu kebijakan, tentunya hal yang pertama yang harus dilakukan ialah melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan yang diterapkan tersebut. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, sebesar 86% dari para pemiik lahan pertanian di Kecamatan Pangalengan tidak mengetahui tentang adanya UU kebijakan lahan abadi pertanian tersebut. Persentase pemilik lahan yang pernah mendengar atau mengetahui tentang Undang-Undang tersebut hanya sebesar 14% saja (Gambar 5).



Gambar 5. persentase responden yang mengetahui UU

#### f. Konversi Lahan

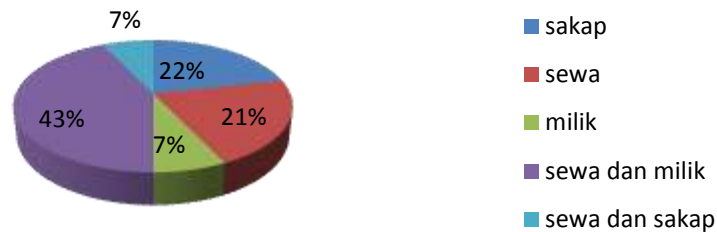
Berdasarkan hasil wawancara, sebesar 71% para pemilik lahan pertanian di ketiga desa yang menjadi lokasi penelitian tidak pernah melakukan konversi lahan pertanian ke non pertanian sedangkan sisanya pernah melakukan konversi lahan pertanian menjadi tempat tinggal maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Gambar 6).



Gambar 6. persentase responden yang pernah mengonversi lahan

#### g. Kepemilikan Lahan

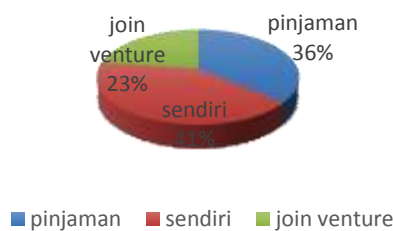
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pemilik lahan, sebagian besar (43%) kepemilikan lahan pertanian di Kecamatan Pangalengan berupalahan sewa dan milik sendiri, sakap 22%, sewa 21% , sewa dan sakap 7% serta milik sendiri sebesar 7% (Gambar 7).



Gambar 7. kepemilikan lahan

#### h. Sumber Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting setelah lahan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, sebagian besar modal yang dipakai oleh para pemilik lahan pertanian yaitu sebesar 41% berasal dari kepemilikan modal sendiri, 36% berasal dari dana pinjaman, dan sebesar 23% berasal dari patungan (joint venture).



Gambar 8 persentase kepemilikan lahan

#### i. Tanggapan Pemilik Lahan Terhadap Dukungan Pemerintah

Setelah melakukan wawancara kepada para pemilik lahan di Kecamatan Pangalengan, sebesar 86% dari para pemilik lahan pertanian setempat masih merasa kurangnya dukungan dari pemerintah. Harapannya, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa modal, alat-alat pertanian dan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih besar untuk petani setempat. HGU merupakan isu terkini dan menjadi tuntutan utama dari para pemilik lahan di tiga desa yang menjadi lokasi penelitian.



Gambar 9 persentase respon dari responden terhadap dukungan pemerintah

## 2. Hasil Wawancara Dengan Dinas Terkait

Menurut dinas-dinas terkait seperti Bappeda, BPN dan Dinas Pertanian, mereka telah mendukung adanya UU mengenai kebijakan lahan pertanian abadi, namun sampai saat ini dukungan yang mereka berikan baru sampai pada peraturan daerah (perda) irigasi yang memetakan daerah-daerah produktif.

Masih dirasakan banyak hambatan untuk penerapan kebijakan ini, seperti data yang sulit didapatkan dan kurangnya kerjasama dari masyarakat setempat. Namun berbeda halnya dengan desa Sangkanhurip di Kecamatan Katapang yang berhasil melakukan peraturan desa (perdes) yang mengharuskan warganya untuk melindungi lahan pertanian, perdes tersebut telah berhasil dan diupayakan untuk digunakan di berbagai desa lainnya. Pemerintah daerah dan dinas terkait akan memberi bantuan dan insentif bagi warga yang mau berpartisipasi membantu pemerintah dalam penerapan kebijakan UU tersebut.

Permasalahan teknis lainnya dalam penerapan lahan abadi ini adalah sulitnya memperoleh data riil di lapangan akibat dibutuhkannya biaya yang besar dan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data riil tersebut. Banyaknya konversi lahan pertanian dalam skala kecil seperti pembangunan kredit perumahan rakyat (KPR) yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) serta tanpa melalui izin Bappeda juga semakin menambah kesulitan pemerintah daerah.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, belum ada sanksi yang tegas dan pembagian wewenang yang jelas dari pemerintah, tidak terdapat insentif bagi pemilik lahan, pesatnya pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah adalah faktor penghambat penerapan kebijakan “Lahan Abadi” pertanian.

### **Saran**

1. Diperlukan adanya suatu sanksi yang tegas dan pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar Undang-undang mengenai “lahan abadi” ini agar benar-benar dapat direalisasikan.
2. Pemberian insentif bagi petani berupa keringanan PBB, infrastruktur, penyediaan sarpras pertanian, sertifikat tanah, penghargaan, dll.
3. Perlindungan petani berupa jaminan terkait dengan harga komoditas yang menguntungkan, jaminan pemasaran, dan ganti rugi akibat gagal panen
4. Pemberdayaan dan penguatan petani dengan kelembagaan petani, penyuluhan, permodalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan

## **VII. DAFTAR PUSTAKA**

- Juanda B. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Bogor (ID): IPB Pr.
- Handari AW. 2012. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang [tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
- Nugroho TW. 2007. [Jurnal]. Tantangan Dalam Mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Abadi.
- RijaS. 2008. [Jurnal]. Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan.

## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi Kegiatan

#### a. Proses wawancara dan Pemberian Souvenir dengan Dinas Terkait



#### b. Proses Wawancara dengan Petani



#### c. Keadaan Pertanian di Kecamatan Pangalengan



## 2. Nota dan Kwitansi Pengeluaran

